

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang mengatur urusan desa. Desa diberikan tanggung jawab dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri untuk lebih memahami masalah persoalan desanya masing-masing, sehingga pemerataan pembangunan dapat terlaksana dan kesenjangan masyarakat diminimalisir dengan adanya peningkatan kesejahteraan melalui program-program kemandirian desa. Pembiayaan program-program tersebut bersumber dari berbagai pemerintah baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi , Pemerintah Daerah maupun dari pendapatan asli desa (PAD) sendiri. Salah satu anggaran dana yang diberikan kepada desa adalah Dana Desa yang bersumber dari APBN. Kebijakan Dana Desa dari tahun ke tahun semakin meningkat, di tahun 2015 Dana Desa yang disalurkan dari APBN sebesar Rp.20,67 Trilyun, Tahun 2016 sebesar Rp.46,9 Trilyun, Tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp.60 Trilyun dan Tahun 2019 meningkat menjadi Rp.70 Trilyun (BPKP, 2015)

Peran besar yang diterima pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa tersebut harus memiliki tanggung jawab dan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana segala penggunaan Dana Desa harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang mana diwakilkan oleh BPD sebagai bentuk representasi masyarakat dan Kepala Desa juga melaporkan laporan penggunaan dana desa kepada Bupati/walikota yang mana nantinya Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri dalam Negeri, Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Dispermades Jawa Tengah, 2019).

Dengan adanya anggaran dana desa yang besar dan sistem pelaporan tahap demi tahap sesuai format aturan, tentu harus diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) karena besarnya dana desa yang harus dikelola tentu memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya khususnya dalam penyusunan laporan penggunaan dana desa. Dikutip dari Indonesia *Anti Corruption Forum* (2014) dalam penelitian (Aminah dan Sutanto 2018: 150) menyatakan “salah satu penyebab penyalahgunaan Dana Desa adalah kemampuan SDM aparat yang rendah”. Kemampuan dalam melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan lain yang menyangkut desa harus dimiliki pemerintah desa dan masyarakat desa yang diwakilkan oleh BPD sehingga nantinya baik pemerintah desa maupun BPD dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa dengan baik dan BPD dapat mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah desa (Dispermades Provinsi Jawa Tengah). Dalam Penelitian BPP Kemendagri (2015) juga menemukan bahwa “ketidakmampuan SDM aparat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban menyebabkan beberapa desa tidak melaporkan laporan penggunaan Dana Desa”.

Hasil penelitian di kota Denpasar juga menunjukkan bahwa “kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar”. Artinya akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan dengan baik maka kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya dalam penyelenggaraan tugas pemerintah desa semakin baik juga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) , di Kabupaten Buleleng juga menyatakan “apabila kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan baik, maka output atau hasil berupa laporan keuangan akan semakin baik”. Roshanti (2014) juga menunjukan hasil penelitian bahwa “variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan

ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah”. Dengan demikian, secara keseluruhan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas pemerintah desa dapat mengakibatkan salah satunya tugas penyampaian laporan dana desa tidak tepat waktu dan apabila kemampuan atau kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan baik, maka hasil berupa laporan keuangan akan semakin baik dilihat dari ketepatanwaktuan maupun dari kualitas laporan keuangannya sendiri.

Kabupaten Banjarnegara sendiri merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 266 desa, dari jumlah keseluruhan desa di Kabupaten Banjarnegara 115 desa masih mengalami keterlambatan atau tidak tepat waktu dalam pelaporan laporan realisasi dana desa tahun anggaran 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) 193/PMK.07/2018 bahwa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 februari tahun anggaran berjalan kepada Bupati/Walikota atau Kecamatan.

Tabel 1.1
Presentase Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2018
Per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara

No	Kecamatan	Presentase %	
		Tepat Waktu	Terlambat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Wanadadi	90,9 %	9,1 %
2	Wanayasa	100%	0%
3	Banjarnegara	100%	0%
4	Batur	100%	0%
5	Bawang	94,4 %	5,6 %
6	Karangkobar	84,6 %	15,4 %
7	Mandiraja	31,2 %	68, 7 %
8	Pagentan	0%	100%
9	Pejawaran	100%	0%
10	Punggelan	88,2 %	11,8 %
11	Purwanegara	46,1 %	53,9 %

No	Kecamatan	Presentase %	
		Tepat Waktu	Terlambat
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Purwareja Klampok	62,5 %	37,5 %
13	Rakit	63,6 %	36,4 %
14	Sigaluh	78,6 %	21,4 %
15	Susukan	33,3 %	66,7 %
16	Banjarmangu	100%	0%
17	Madukara	11,1 %	88,9 %
18	Kalibening	18,7 %	81, 3%
19	Pandanarum	87,5 %	12,5 %
20	Pagedongan	11,1 %	88,9 %

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa presentase laporan realisasi dana desa tahun 2018 Per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara masih mengalami keterlambatan. Dari 20 kecamatan di kabupaten banjarnegara terdapat 1 kecamatan yang 100 % mengalami keterlambatan laporan dana desa tahun 2018 yaitu kecamatan pagentan yang mengindikasikan bahwa seluruh desa di kecamatan pagentan terlambat menyampaikan laporan realisasi dana desa tahun 2018. Menurut Morgan dalam Lasmana, Hafiz (2017:12) “Kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu”.

Kondisi keterlambatan seluruh Desa di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara terkait laporan realisasi dana desa tahun anggaran 2018 mengindikasikan bahwa kemampuan pelaporan dana desa masih kurang. Keterlambatan pelaporan laporan realisasi dana desa tahun anggaran 2018 di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara disebabkan proses penyusunan laporan yang memiliki kendala salah satunya dikarenakan proses penginputan data yang

keliru pada sistem Aplikasi Siskeudes yang baru digunakan di tahun 2018. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Suprayugo selaku Kasi PMD Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara bahwa “salah satu kendala keterlambatan laporan dana desa ya desa masih suka keliru dalam memasukan data di aplikasi siskeudes karna kan input data harus dicek sebelum input karna di aplikasi ga bisa diubah sewaktu-waktu ada prosesnya”. Penyampaian laporan yang terlambat atau tidak tepat waktu di Kecamatan Pagentan dikarenakan terjadi permasalahan teknis dimana kurang ketelitian perangkat desa dalam menginput data laporan dana desa pada aplikasi siskeudes.

Berdasarkan peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2016 tentang “kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara mempunyai wewenang salah satunya yaitu Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan dan administrasi desa serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan administrasi desa”. Salah satu permasalahan atau isu strategis dari Dispermades adalah masih minimnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dengan jumlah anggaran yang besar baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten (LKJIP, 2018). Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara bahwa salah satu sasarannya adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga pemerintah desa. Target kinerja peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga pemerintah desa belum tercapai.

Tabel 1.2
Persentase Target Kinerja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara dalam Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Tahun 2018 dan 2019

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	-	59,5%	59,84%
----	--	---	-------	--------

Sumber : LKJIP Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara, 2019

Pada tahun 2018, realisasi sebesar 59,5% dari target 65% dengan capaian 91,5% sedangkan tahun 2019, realisasi sebesar 59,84% dari target 75% dengan capaian 79,79%. Target kinerja dalam peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD tidak tercapai. Hasil data tersebut membuktikan juga bahwa upaya pengembangan kapasitas yang dilakukan pemerintah kabupaten belum tercapai dan kapasitas perangkat desa masih terbatas.

Berdasarkan permasalahan desa-desa di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, bahwa kapasitas pemerintah desanya tidak tepat waktu dalam pelaporan laporan realisasi dana desa tahun anggaran 2018 yang diakibatkan faktor penyusunan oleh perangkat desa yang masih kesulitan menginput data laporan. Kemudian, berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dispermades PPKB bahwa peningkatan kapasitas pemerintah desa belum mencakup seluruh perangkat desa. Dengan demikian SDM perangkat desa di Kecamatan Pagentan dalam penyusunan laporan dana desa masih rendah dan upaya pengembangan kapasitas yang dilakukan belum maksimal. Dengan adanya fenomena tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kapasitas Pemerintah Desa dalam Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2019 di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian atau paparan yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah yang kemudian akan dijadikan sebagai acuan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa dalam Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2019 di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana Upaya Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2019 di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk menganalisis Kapasitas Pemerintah Desa dalam Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2019 di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara
2. Untuk menganalisis Upaya Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2019 di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam menganalisis masalah di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan program studi ilmu pemerintahan khususnya kondisi kapasitas pemerintah desa terkait penyusunan laporan dana desa yang masih menjadi kendala.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk terus meningkatkan kapasitas SDM pemerintah desa khususnya dalam penyusunan laporan realisasi dana desa agar tidak terjadi kesalahan dan dapat melaporkan laporan pertanggungjawaban tepat waktu serta lebih memaksimalkan kembali upaya-upaya pengembangan kapasitas pemerintah desa.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan baru kepada publik mengenai pentingnya melakukan pengawalan pelaporan dana desa yang disusun oleh perangkat desa, sehingga nantinya masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari dana desa untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan di desanya.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah hasanah dan wawasan keilmuan mengenai seberapa pentingnya peningkatan kapasitas pemerintah desa sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan dana desa akibat ketidaktahuan tentang pengelolaannya khususnya dalam pelaporan dana desa dan bagaimana memaksimalkan kinerja perangkat desa agar sesuai kapasitas yang diharapkan dengan upaya pengembangan kapasitas.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai dasar dan acuan, dimana penelitian terdahulu memudahkan dalam penyusunan skripsi dan terhindar dari adanya duplikasi penelitian atau kesalahan yang ada pada penelitian sebelumnya.

Berdasarkan telaah kepustakaan penelitian sebelumnya yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti mengenai kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan laporan realisasi dana desa tahun 2019 di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara yaitu:

Pertama, penelitian dari Sri Wulandari. S (2017) yang berjudul Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, teknik pengumpulan

data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis data dengan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa di Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana sebenarnya dari segi aspek kemampuan dalam administrasi itu sudah membaik dari tahun ketahun, tetapi dari segi penentuan program kerja dalam penggunaan ADD itu masih minim. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni; (1) Masyarakat Desa Margolembo telah mempercayai pihak pemerintah desa dalam segala urusan pemerintahan desa, dan (2) Pengawasan oleh tim pengawas belum maksimal, (3) Kurangnya sumber daya manusia di kantor desa margolembo juga merupakan faktor utama tidak maksimalnya kinerja aparat desa dalam bidang pengelolaan ADD.

Kedua, Penelitian dari Sitti Aminah dan Hari Prasetyo Sutanto (2018) yang berjudul Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis deskriptif-kausalitas. Data dikumpulkan pada bulan Agustus dan September 2016 di Kabupaten Bogor dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil analisis menyimpulkan kapasitas aparat desa tergolong cukup namun belum optimal mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui penambahan intensitas, memperpanjang waktu dan pedalaman materi, disertai praktik secara teknis dalam perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan dalam diklat. Peningkatan pendampingan (melalui pelibatan pendamping Desa dan Lembaga Pemerhati Desa) juga diperlukan disamping meningkatkan intensitas sosialisasi UU Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Ketiga, Penelitian dari Yunianingrum (2017) yang berjudul Kemampuan Aparat Pemerintah Desa dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kasus: Desa Bringinwareng dan Desa Guyangan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilengkapi dengan data kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden maupun informan melalui kuesioner, observasi serta wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen atau arsip. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan aparat pemerintah Desa Bringinwareng berada pada kategori baik dengan efektivitas pengelolaan keuangan desa yang tinggi, sedangkan kemampuan aparat pemerintah Desa Guyangan berada pada kategori sedang dengan efektivitas pengelolaan keuangan desa yang sedang pula. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji secara statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kemampuan aparat pemerintah dengan efektivitas pengelolaan keuangan desa, baik di Desa Bringinwareng maupun di Desa Guyangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti tentu mempunyai perbedaan dimana peneliti disini akan menganalisis kapasitas pemerintah desa terkait laporan realisasi dana desa dengan menggunakan lokus penelitian di desa-desa dalam satu wilayah Kecamatan serta bagaimana upaya pengembangan kapasitas yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagai upaya pengembangan kapasitas Pemerintah Desa. Penelitian ini juga akan menganalisis menggunakan teori *Capacity Building* dan dengan menggunakan metode penelitian *mixed method*.

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Definisi Kapasitas

Istilah kapasitas dalam berbagai kamus mempunyai sejumlah arti. “Kapasitas adalah jumlah total barang, jumlah total yang dapat diproduksi, dan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu.” (Cambridge Dictionary, N.d) “Kapasitas adalah kekuatan daya tamping, jumlah yang bisa terkandung, jumlah maksimum yang bisa diserap, kemampuan untuk belajar dan memahami, dan kemampuan untuk melakukan.” (Colin Dictionary, N.d)

Kapasitas adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang sesuai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan (Grindle (1997:34). Kapasitas adalah kemampuan individu dan organisasi untuk melakukan fungsi secara efektif, efisien dan berkelanjutan (Geene, 2003 : 4). Kapasitas adalah sifat yang memungkinkan sebuah organisasi atau sistem untuk bertahan hidup, tumbuh, diversifikasi, dan menjadi lebih kompleks; kapasitas adalah kemampuan kolektif yaitu kombinasi dari atribut yang memungkinkan sistem untuk melakukan, memberi nilai, membangun hubungan, dan untuk memperbaharui diri, atau dengan kata lain merupakan cara dan kemampuan yang memungkinkan sistem: individu, kelompok, organisasi, kelompok organisasi dapat melakukan sesuatu dengan niat dari waktu ke waktu secara efektif (Morgan, 2006: 6-7). Kapasitas terdiri dari sejumlah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan, tingkah laku, motivasi, sumber dan kondisi yang memungkinkan individu, organisasi, jaringan/sektor dan sistem sosial yang luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan mereka sepanjang waktu (Balger, 2000: 2).

1.6.2 Level-level Kapasitas

Geene (2003: 5-6) mengetengahkan tiga tingkatan kapasitas, yaitu tingkat sistem, organisasi dan individu. Kapasitas tingkat sistem adalah tingkat kapasitas yang paling tinggi. Dimensi kapasitas sistem meliputi: 1) dimensi kebijakan, 2) dimensi hukum/peraturan, 3) dimensi manajemen/akuntabilitas, 4) dimensi sumber daya, 5) dimensi proses antar- hubungan. Kapasitas organisasi atau entitas meliputi: (1) manajemen sumber daya manusia, (2) manajemen sumber daya keuangan, (3) partisipasi yang adil, (4) keberlanjutan manfaat program, (5) kemitraan, (6) organisasi belajar, dan (7) manajemen strategis. Kapasitas tingkat individual adalah dimensi utama dari kapasitas, meliputi orang-orang, termasuk jaringan kecil antar individu. Kapasitas tingkat individu termasuk manajemen, para profesional, dan staf pendukung serta orang-orang yang merupakan penerima manfaat atau sebaliknya mempengaruhi (misalnya kelompok klien tertentu dan segmen masyarakat).

Matachi (2006: 6) mengetengahkan tiga level kapasitas. Pertama, kapasitas pada tingkat individu, terdiri dari elemen-elemen pengetahuan, keterampilan, sikap, kesehatan, kesadaran, dan lain-lain. Kedua, kapasitas pada tingkatan organisasi terdiri dari: 1) sumber daya manusia, misalnya kapasitas individu dalam organisasi; 2) sumber daya fisik, misalnya fasilitas, perlengkapan material, dan kapital; 3) sumber daya intelektual, misalnya strategi organisasi, perencanaan strategis, teknologi produksi, pengetahuan berbisnis, proses manajemen yang berdampak pada pemanfaatan sumber-sumber daya; dan 5) kepemimpinan manajerial. Ketiga, tingkatan lingkungan, terdiri dari elemen-elemen 1) aturan formal institusi (hukum, kebijakan, perintah, undang-undang, peraturan keanggotaan); 2) institusi informal (kebiasaan/adat-istiadat, budaya, norma, dan lain-lain); 3) kapital sosial, infrastruktur sosial, dan lain-lain.

Menurut (Prof. Dr. H. R. Riyadi Soeprapto, MS: 2010) kapasitas pemerintah dilaksanakan dalam tiga tingkatan:

1. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan dan kebijakan
2. Tingkatan organisasi, contohnya struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi
3. Tingkatan individual, contohnya pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, pengelompokkan pekerjaan dan motivasi

1.6.3 Capacity Building

Tindakan peningkatan kemampuan organisasi atau institusi dalam menjalankan tugas pekerjaan yang menjadi kewenangannya, sebenarnya hingga saat ini belum ada istilah yang disepakati oleh para teoritis. seperti halnya Milen (2001) “yang intinya bahwa beberapa teoritis ada yang menyebut aktivitas peningkatan

kemampuan organisasi tersebut sebagai *capacity development*, ada yang menyebut dengan istilah *capacity building*, dan ada pula yang mengistilahkan sebagai *capacity strengthening*” (Saleh, Choirul, dkk, 2013 : 36)

Grindle, 1997: 6-22 menyebutkan bahwa “ *Capacity Building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performances*”.

Sension dalam Haryono, Soemartono, Zauhar, Supriyono (2012: 39-40) mengemukakan bahwa “*Capacity Building is understood to mean helping governments, communities and individuals to develop the skills and expertise needed to achieve their goals. Capacity building program, often designed to strengthen participant’s abilities to evaluate their policy choice and implement decisions effectively, may include education and training, institutional and legal reforms, as well as scientific, technological and financial assistance*”. (Pembangunan Kapasitas biasanya dipahami sebagai alat untuk membantu pemerintah, komunitas, individu-individu dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Program pembangunan kapasitas, dapat didesain untuk memperkuat kemampuan partisipan dalam mengevaluasi pilihan kebijakan dan implemementasi kebijakan secara efektif, termasuk pendidikan dan pelatihan, lembaga, dan reformasi kebijakan, begitu juga pengetahuan, teknologi dan membantu perekonomian).

Pengertian ini juga didukung oleh Rosalyn Rubenstein (2008) yang mengatakan bahwa:

“*Capacity building has been defined as both capacities (Connolly and Lukas,2002) and actions (Blumenthal, 2004) to strengthen an organization’s ability to achieve its vision and to sustain itself. the end result of capacity building is improved organizational health and overall effectiveness, resulting in increased impacts and outcomes (Linnel, 2003;Newborn,2008).*

Morison (2001: 42) melihat “*capacity building* sebagai suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level di dalam individu, kelompok

organisasi dan sistem dalam rangka rangka untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada”.

Apabila berbagai pendapat tersebut disimak secara seksama, dapat diambil sebuah pemahaman bahwa apa yang disebut sebagai aktivitas pengembangan “kapasitas itu adalah merupakan proses internal yang harus dilakukan secara terus menerus, dan bersifat integral yang bertujuan untuk membantu melakukan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan individu, organisasi mapupun bagi institusi, yang bermuara pada terpelihara dan terciptanya peningkatan jasa pelayanan yang disediakan oleh organisasi itu bagi masyarakat yang membutuhkan” (Saleh, Choirul, dkk, 2013 : 36)

Kemudian Ann Philbin (1996:19), mendefinisikan *Capacity Building* sebagai berikut:

Capacity building is defined as the "process of developing and strengthening the skills, instincts, abilities, processes and resources that organizations and communities need to survive, adapt, and thrive in the fast-changing world.

Berdasarkan penjabaran di atas Ann Philbin mendefinisikan *Capacity Building* (pengembangan kapasitas) sebagai proses mengembangkan dan meningkatkan keterampilan, bakat, kemampuan sumber daya organisasi sebagai kebutuhan untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan menumbuhkan organisasi di era perubahan yang cepat.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (2001:5) mendefinisikan *Capacity Building* adalah pembangunan atau peningkatan kemampuan secara dinamis untuk mencapai kinerja dalam menghasilkan out-put dan out-come pada kerangka tertentu.

Lebih lanjut ACBF (Rainer Rohdewohld, 2005:12) menjelaskan *Capacity Building* dalam lingkupan yang lebih luas dan rinci bahwa :

Capacity building can be defined as a process to increase the ability of individuals, groups, organisations, communities or societies to (i) analyse their environment, (ii) identify problems, needs, issues and opportunities,(iii) formulate strategies to deal with these problems, issues and needs, and seize

the relevant opportunities, (iv) design a plan of action, and (v) assemble and use effectively and on a sustainable basis resources to implement, monitor and evaluate the plan of actions, and (vi) use feedback to learn lessons.

Penjelasan di atas dapat didefinisikan bahwa *Capacity Building* dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk:

- a) Menganalisa lingkungannya;
- b) mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu dan peluang-peluang;
- c) memformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah, isu-isu dan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan memanfaatkan peluang yang relevan;
- d) merancang sebuah rencana aksi, serta mengumpulkan dan menggunakannya dengan efektif, dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi rencana aksi tersebut dan;
- e) memanfaatkan umpan balik sebagai pembelajaran.

Capacity Building (Pengembangan Kapasitas) menurut Soeprapto (2006 : 11) yakni :

- a. Pengembangan kapasitas bukanlah produk, melainkan sebuah proses;
- b. Pengembangan kapasitas adalah proses pembelajaran multi-tingkatan meliputi individu, grup, organisasi dan sistem;
- c. Pengembangan kapasitas menghubungkan ide terhadap sikap;
- d. Pengembangan kapasitas dapat disebut sebagai actionable learning dimana pengembangan kapasitas meliputi sejumlah proses-proses pembelajaran yang saling berkaitan, akumulasi benturan yang menambah prospek untuk individu dan organisasi agar secara terus menerus beradaptasi atas perubahan.

UNDP dan *Canadian International Development Agency* (CIDA) dalam Milen (2006 : 15) memberikan pengertian peningkatan kapasitas sebagai: proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk (a) menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi (*core functions*), memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan (b) memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan.

1.6.4 Dimensi/Level Pengembangan Kapasitas

UNDP mengidentifikasi tiga tingkat di mana kapasitas ditumbuhkan dan dipupuk: dalam lingkungan yang mendukung, dalam organisasi, dan di dalam individu. Ketiga tingkat ini saling mempengaruhi satu sama lain dengan cara yang cair- kekuatan masing-masing bergantung pada, dan menentukan, kekuatan yang lain.

a. Lingkungan yang mendukung (*The Enabling Environment*) : adalah sistem sosial yang luas di mana orang dan organisasi berfungsi. Ini mencakup semua aturan, hukum, kebijakan, hubungan kekuasaan dan norma-norma sosial yang mengatur ketertiban sipil. Ini adalah lingkungan yang memungkinkan yang menentukan lingkup keseluruhan untuk pengembangan kapasitas.

b. Tingkat organisasi (*The Organizational Level*): mengacupada struktur internal, kebijakan, dan prosedur yang menentukan efektivitas organisasi. Di sinilah manfaat dari lingkungan yang mendukung dimasukkan ke dalam tindakan dan kumpulan individu berkumpul. Semakin baik sumber daya dan selaras elemen-elemen ini, semakin besar potensi untuk kapasitas yang semakin besar.

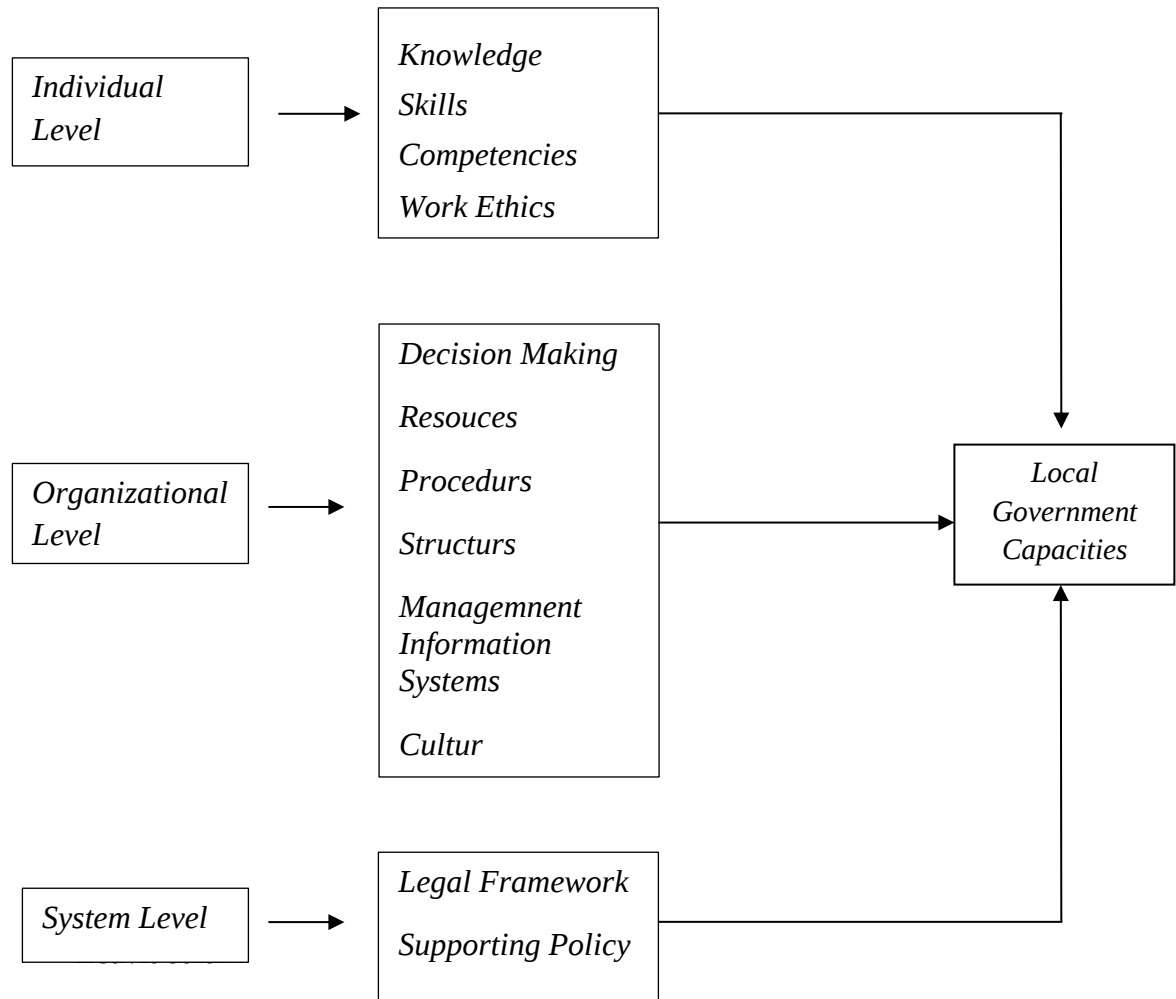
c. Pada tingkat individu (*The Individual Level*) : adalah keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan. Beberapa di antaranya diperoleh secara formal, melalui pendidikan dan pelatihan, sementara yang lain datang secara informal, melalui melakukan dan mengamati. Akses ke sumber daya dan pengalaman yang dapat mengembangkan kapasitas individu sebagian besar dibentuk oleh faktor organisasi dan lingkungan yang dijelaskan di atas, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh tingkat pengembangan kapasitas di masing-masing individu.

Agak berbeda pandangan dengan UNDP, Brown, Lafond & Macintyre (2001) mengatakan bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan terdiri dari 4 (empat) level

yang meliputi : “*health system level, organization level, human resource (health program personnel) level and individual or community level*”. Meskipun para ahli berbeda pandangan tentang berapa level yang dipakai namun bukan berarti bahwa setiap melakukan aktivitas pengembangan kapasitas kelembagaan selalu ditujukan dan diorientasikan pada semua level. pihak aktor atau pelaksana pengembangan kapasitas, boleh memilih dan memprioritaskan terhadap level mana dari kegiatan pengembangan kapasitas itu sesuai kebutuhan yang paling mendesak.

GTZ (*Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit*) dalam Milen (2006: 22) yang menggambarkan bahwa dalam proses pengembangan kapasitas terdapat tiga tingkatan (level) yang harus menjadi fokus analisis dan proses perubahan dalam suatu organisasi. Ketiga tingkatan itu adalah: (a) tingkatan sistem/kebijakan, (b) tingkatan organisasi/lembaga, dan (c) tingkatan individu/sumber daya manusia. Ketiga tingkatan ini dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

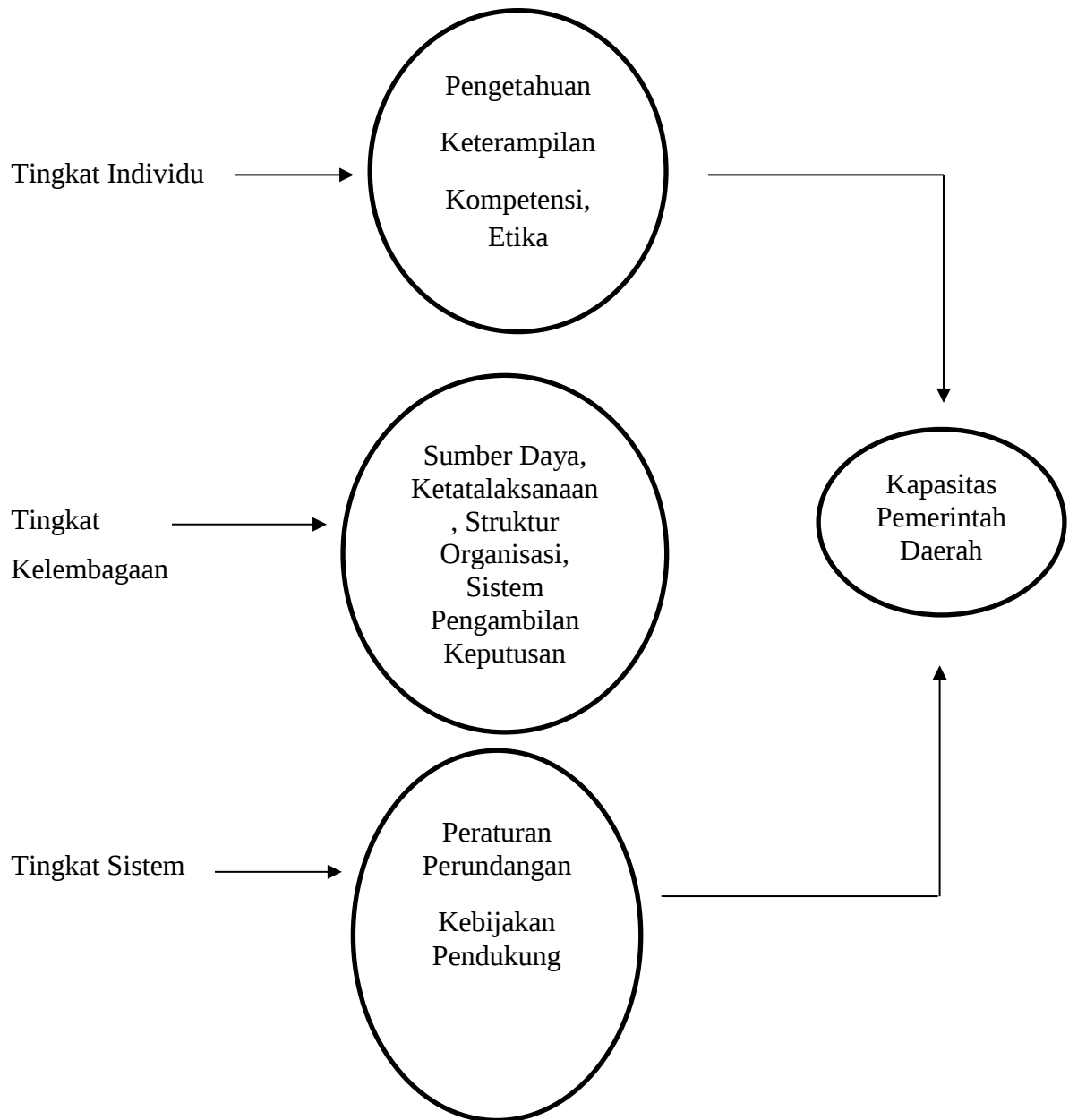
Gambar 1.1
Level Pengembangan Kapasitas (GTZ dalam Milen, 2006: 22)



Djarmiko (2004: 97) menjelaskan “tingkatan pengembangan kapasitas sebagai berikut:”

- a. Tingkat individu, meliputi: pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan etika,
- b. Tingkat kelembagaan, meliputi: sumber daya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan, dan
- c. Tingkat sistem meliputi: peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendukung.

Gambar 1.2
Tingkatan Pengembangan Kapasitas (Leavit dalam Djatmiko, 2004: 106)



Lebih lanjut, dalam rangka pengembangan kapasitas bahwa pengembangan kapasitas mencakup: (1) tingkat sistem, menetapkan kondisi-kondisi kerangka yang memungkinkan dan membatasi (pengatur) bagi pemerintah daerah, dan dimana berbagai komponen sistem berinteraksi satu sama lain, (2) tingkat kelembagaan

(entitas), tingkat badan atau lembaga teknis, atau lembaga pengantar pelayanan (service delivery) dengan struktur organisasi tertentu, proses-proses kerja dan budaya kerja, dan (3) tingkat individu, keterampilan dan kualifikasi individu berupa uraian pekerjaan, motivasi dan sikap kerja. Untuk lebih jelasnya, aspek pengembangan kapasitas dapat dilihat pada tiga hal, yaitu: (1) tingkat individu, mencakup pengetahuan, keterampilan, kompetensi, etika dan etos kerja, (2) tingkat kelembagaan, mencakup sumberdaya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan, dan (3) tingkat sistem, mencakup peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukung.

Dalam melakukan pengembangan kapasitas individu, tingkatan kompetensi atau kapasitas individu bisa diukur melalui konsep dari Gross (Sudrajat, 2005: 54), yang menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan adalah sebagai berikut :

- 1) *Knowledge* yang meliputi: *general knowledge, technical knowledge, jobs and organisation, administrative concept and methods, dan selfknowledge*.
- 2) *Ability* yang meliputi: *management, decision making, communication, planing, actuating / organizing, evaluating / controlling, working with others, handling conflicts, intuitive thought, communication, dan learning*.
- 3) *Interest* yang meliputi: *action orientation, self-confidence, responsibility, dan normes and ethics*.

Sedangkan untuk melihat kemampuan pada level organisasi, dapat digunakan konsep Polidano (1999 : 21) yang dianggap sangat cocok untuk diterapkan pada sektor publik (pemerintahan). Terdapat tiga elemen penting untuk mengukur kapasitas sektor publik, sebagai berikut :

- a. *Policy capacity*, yaitu kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah, dan memberikan analisis terhadap keputusan tadi.
- b. *Implementation authority*, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, dan

kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat.

c. *Operational efficiency*, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif/efisien, serta dengan tingkat kualitas yang memadai.

Merilee S.Grindle (1997: 1-28) sebagai pakar *capacity building* yang lebih khusus mengkaji dalam bidang pemerintahan memfokuskan *capacity building* pada tiga dimensi, yaitu:

1. *Human resource development*
2. *Organizational strengthening*
3. *Institutional reform*

Tabel 1.3
Dimensi *Capacity Building*

<i>Dimension</i>	<i>Focus</i>	<i>Types of Activities</i>
<i>Human resource development</i>	<i>Supply of professional and technical personnel</i>	<i>Training, salaries, condition of work, recruitment</i>
<i>Organizational strengthening</i>	<i>Management systems to improve performance of specific tasks and functions; micro structures</i>	<i>Incentive systems, utilization of leadership, organizational culture, communications, managerial structures</i>
<i>Institutional reform</i>	<i>Institutional and systems; Macro structures</i>	<i>Rules of the game for economic and political regimes, policy and legal change, constitutional reform</i>

Sumber: Merilee S. Grindle dalam Saleh, Choirul, dkk (2013)

Adapun penjelasan dari ketiga unsur di atas menurut Keban (2000 : 7) dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Dalam konteks pengembangan sumberdaya manusia, perhatian diberikan kepada pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan teknis. Kegiatan yang dilakukan antara lain training, pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja dan sistem rekrutmen yang tepat.

b) Dalam kaitannya dengan pengembangan organisasi, pusat perhatian ditujukan kepada sistem manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dan pengaturan struktur mikro. Aktivitas yang harus dilakukan adalah menata sistem insentif, pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi, dan struktur manajerial.

c) Dan berkenaan dengan reformasi kelembagaan, perlu diberi perhatian terhadap perubahan sistem dan institusi-institusi yang ada, serta pengaruh struktur makro. Dalam hal ini aktivitas yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan “aturan main” dari sistem ekonomi dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan aturan hukum, serta reformasi sistem kelembagaan yang dapat mendorong pasar dan berkembangnya masyarakat madani

D. Eade (1998 : 24) merumuskan bahwa untuk meningkatkan kemampuan ada tiga dimensi yaitu : 1) individu 2) organisasi dan 3) jaringan. Upaya pengembangan kemampuan individu dan organisasi adalah kunci utama dan strategi yang utama untuk meningkatkan kinerja (Mentz, 1997 : 9). Namun dengan adanya dimensi jaringan juga merupakan hal yang penting, karena melalui dimensi ini individu dan organisasi dapat belajar mengembangkan kemampuan mereka dan jaringan dapat membuat individu dan organisasi dapat berinteraksi dengan lingkungannya.

Sementara itu, UNDP (Riyadi, 2006:13) memfokuskan *Capacity Building* pada tiga dimensi yaitu :

- (1) tenaga kerja (dimensi sumberdaya manusia), yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan;
- (2) modal (dimensi phisik) yaitu menyangkut peralatan, bahan-bahan yang diperlukan, dan gedung; dan
- (3) teknologi yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, pembuatan keputusan, pengendalian dan evaluasi, serta sistem informasi manajemen.

Berikut mengenai tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas menurut Riyadi (2006 : 15) adalah :

- a. Dimensi dan tingkatan Individu, adalah tingkatan dalam sistem yang paling kecil, dalam tingkatan ini aktivitas *Capacity Building* yang ditekankan adalah pada aspek membelajarkan individu dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam ruang lingkup penciptaan peningkatan keterampilan-keterampilan dalam diri individu, penambahan pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini, peningkatan tingkah laku untuk memberikan tauladan, dan motivasi untuk bekerja lebih baik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan lembaga/organisasi yang telah dirancang sebelumnya dengan berbagai kegiatan-kegiatan misalnya contoh kecil dengan pelatihan, sistem rekrutmen yang baik, sistem upah dan sebagainya.
- b. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada kelembagaan atau organisasi terdiri atas sumber daya organisasi, budaya organisasi, ketatalaksanaan, struktur organisasi atau sistem pengambilan keputusan dan lainnya.
- c. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada sistem merupakan tingkatan yang paling tinggi dimana seluruh komponen masuk didalamnya. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu; Komponen-komponen tersebut diantaranya seperti kebijakan dan sumber daya manusia dan lainnya.

1.7 Definisi Konseptual

Operasionalisasi adalah informasi ilmiah yang membantu penelitian selanjutnya yang akan menggunakan variabel yang sama. Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan laporan realisasi dana desa, definisinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Definisi Konseptual

Konsep	Indikator
<i>Capacity building</i> sebagai suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level di dalam individu, kelompok organisasi dan sistem dalam rangka untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada	Untuk mengembangkan kapasitas sebuah organisasi terdapat 3 (tiga) tingkatan pengembangan kapasitas menurut Leavit dalam Djatmiko (2004: 97) yang dilakukan sebagai analisis kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan laporan realisasi dana desa di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:” 1. Tingkat individu a. Pengetahuan mengenai peraturan terkait laporan realisasi penyusunan dana desa serta upaya yang dilakukan dalam pengembangan pengetahuan kapasitas perangkat desa. b. Keterampilan dalam menyusun laporan dan teknis penyampaian pendampingan desa dalam penyusunan laporan dana desa. c. Kompetensi, kompetensi dalam menyusun laporan sesuai format dan mekanisme d. Etika, perilaku kerja perangkat desa dalam menyusun laporan dana desa sesuai fakta di

	lapangan 2. Tingkat kelembagaan a. Sumber daya, sumber daya manusia yang menjalankan tugas dan kewenangannya dengan kualitas yang baik dan sumber daya fisik sebagai penunjang pekerjaan pemerintah desa dan upaya pengembangan kapasitas sdm desa dalam penyusunan laporan dana desa b. Ketatalaksanaan, prosedur kerja dan budaya kerja dalam penyusunan laporan realisasi dana desa dan upaya memastikan pemerintah desa melaksanakan penyusunan laporan dana desa disesuaikan dengan tugas dan fungsi kerja masing-masing perangkat desa di wilayah Kecamatan Pagentan c. Struktur organisasi, memastikan struktur PPKD telah sesuai aturan khususnya penyusunan laporan dana desa dapat dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal di wilayah Kecamatan Pagentan
--	---

	d. System pengambilan keputusan , sistem berbasis komputer yang dipergunakan untuk membantu dalam proses pelaporan dana desa 3. Tingkat sistem a. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan sebagai dasar penyusunan laporan dana desa di wilayah Kecamatan Pagentan b. Kebijakan pendukung sebagai kebijakan tambahan untuk pelaksanaan dalam menyusun laporan realisasi dana desa
--	---

1.8 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method research*), metode campuran adalah rangkaian pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam suatu metodologi penelitian pada kajian tunggal atau kajian beragam tahapan. (Tashakkori dan Teddlie, 2010). Atau dengan kata lain metode penelitian campuran adalah sebuah pendekatan untuk menyelidiki suatu objek dengan mengombinasikan atau menghubungkan bentuk penelitian kualitatif dan bentuk penelitian kuantitatif. (John W. Creswell, 2009 : 348). Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data

meliputi teknik pengumpulan data kualitatif yaitu dengan wawancara, *desk study* dan observasi. Kemudian menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif yaitu berupa survey atau penyebaran kuesioner.

1.8.1 Desain Penelitian

Terdapat 2 (dua) tipe penelitian yaitu eksploratif dan deskriptif. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2005:6) , Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis apa yang sedang diteliti dan berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam. Kemudian, penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2007 : 11)

Desain metode campuran dalam penelitian ini menggunakan desain metode campuran yang berurutan, dimana peneliti melaksanakan tahap penelitian kualitatif secara terpisah dengan penelitian kuantitatif atau sebaliknya. (Tashakkori dan Teddlie, 2010). Tujuan penelitian metode campuran dengan desain metode campuran berurutan adalah untuk meneliti upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kapasitas pemerintah desa terkait penyusunan laporan dana desa di Kecamatan Pagentan dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung pada pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara dan Kasi PMD Kecamatan Pagentan. Kemudian, setelah itu baru

melakukan penelitian kuantitatif dengan menyebar kuesioner untuk meneliti kondisi kapasitas pemerintah desa terkait pelaporan dana desa di Kecamatan Pagentan.

1.8.2 Situs Penelitian

Dalam penelitian Ini, lokasi penelitian kualitatif yang berkepentingan dalam penelitian ini bertempat di Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara dan Kecamatan Pagentan. Kemudian, pada lokasi penelitian kuantitatif bertempat di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.

1.8.3 Subjek Penelitian

Tabel 1.5
Subjek Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif

No	Subjek Penelitian Kualitatif	Subjek Penelitian Kuantitatif
1.	Kasi Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara	Perangkat Desa
2.	Kasi PMD Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara	

Sumber : Data Olahan penulis, 2021

1.8.4 Sumber Data

Menurut Arikunto (2006:129) yang dimaksudkan dengan sumber data dalam penelitian ialah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang dibutuhkan diperoleh dari :

1. Data Primer, merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data ini diambil menggunakan teknik seperti wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi.

2. Data Sekunder, merupakan data yang dapat menunjang data primer. Data ini dapat ditemukan dari berbagai literature seperti buku-buku referensi, jurnal, dan hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen tentang peningkatan pelaporan dana desa di Kabupaten Banjarnegara, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, bahan informasi lainnya yang juga tentunya terkait dengan pokok bahasan yang akan diteliti.

1.8.5 Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2015) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang khusus penyusunan laporan dana desa di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 1.6
Data Jumlah Perangkat Desa Khusus Penyusunan Laporan Dana Desa
Kecamatan Pagentan

NAMA DESA	JUMLAH
Nagasari	6
Aribaya	6
Larangan	6
Karangnangka	7
Sokaraja	6
Gumingsir	5
Kayuares	4
Metawana	6
Kalitlaga	6
Plumbungan	10
Karekan	7
Kasmaran	6
Pagentan	9

Babadan	6
Majasari	6
Tegaljeruk	6
JUMLAH	102

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah 102 perangkat desa yang khusus dalam penyusunan laporan dana desa.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Sugiyono, 2015). Dalam jumlah populasi yang besar peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Maka dengan demikian peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik pengambilan sampel tidak acak atau *Nonrandom sampling/Nonprobability sampling*. Dimana setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel.

Sampel yang diambil dari populasi tersebut tentunya harus benar-benar *representative* atau dapat mewakili karena populasi dalam penelitian ini diketahui maka dalam pengambilan jumlah sampel penulis menggunakan rumus perhitungan sampel Slovin dengan tingkat signifikan 10%. Semakin banyak tingkat kesalahan yang digunakan maka jumlah sampel yang digunakan akan semakin sedikit. Menurut Sugiyono (2008 : 138) dalam (Pradana & Reventiary, 2016) pembulatan ke atas dilakukan karena berdasarkan table ukuran sampel dan batas kesalahan untuk tingkat kelonggaran penelitian 10%.

Rumus Slovin untuk menghitung jumlah sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel) yaitu sebesar 10% dengan tingkat kepercayaan 90%

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N e^2} \\ &= \frac{102}{1 + 102 (0,1)^2} \\ &= \frac{102}{1 + 102 (0,01)} \\ &= \frac{102}{2,02} \end{aligned}$$

$$n = 50,49$$

$$n = 50 \text{ (Dibulatkan)}$$

Dari hasil tersebut peneliti menggunakan Error 10% dan diperoleh jumlah sampel minimum sebanyak 50,49 responden. Untuk mempermudah peneliti membulatkan jumlah responden menjadi 50 responden.

Dalam penelitian ini, untuk menentukan sampel di tiap desa dengan menggunakan rumus presentase:

$$\text{Sampel} = \frac{\text{Populasi}}{\text{Total Populasi}} \times \text{Total sampel}$$

Tabel 1.7
Jumlah Sampel Perangkat Desa Khusus Penyusunan Laporan Dana Desa
Kecamatan Pagentan

NAMA DESA	JUMLAH	HITUNGAN DESIMAL	SAMPEL PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
NAGASARI	6	$\frac{6}{102} \times 50$	3
ARIBAYA	6	$\frac{6}{102} \times 50$	3
LARANGAN	6	$\frac{6}{102} \times 50$	3
KARANGNANGKA	7	$\frac{7}{102} \times 50$	3
SOKARAJA	6	$\frac{6}{102} \times 50$	3
GUMINGSIR	5	$\frac{5}{102} \times 50$	3
KAYUARES	4	$\frac{4}{102} \times 50$	2
METAWANA	6	$\frac{6}{102} \times 50$	3
KALITLAGA	6	$\frac{6}{102} \times 50$	3
LUMBUNGAN	10	$\frac{10}{102} \times 50$	5
KAREKAN	7	$\frac{7}{102} \times 50$	3
KASMARAN	6	$\frac{6}{102} \times 50$	3
PAGENTAN	9	$\frac{9}{102} \times 50$	4
BABADAN	6	$\frac{6}{102} \times 50$	3

NAMA DESA	JUMLAH	HITUNGAN DESIMAL	SAMPEL PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
MAJASARI	6	$\frac{6}{102} \times 50$	3
TEGALJERUK	6	$\frac{6}{102} \times 50$	3
JUMLAH	102		50

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama (Bungin, 2007:111).

Metode wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara dengan beberapa informan yang dapat memberikan data dan informasi terkait kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan laporan realisasi dana desa tahun 2019 di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara dan upaya pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan laporan realisasi dana desa tahun 2019 di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.

2. Desk Study

Desk study/desk research adalah metode pengumpulan informasi dan data yang dilakukan dengan duduk dan bekerja di atas meja. Dengan mengumpulkan data dari beberapa sumber seperti mencari data dari buku-buku referensi, literature, dokumen pemerintah, data dari internet/server, data tersimpan di web-site, jurnal, makalah, dan lain sebagainya. Hal ini lah yang juga tengah dilakukan peneliti dalam

kaitannya mengumpulkan data tentang kondisi kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan laporan realisasi dana desa tahun 2019 di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara dan upaya pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan laporan realisasi dana desa tahun 2019 di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.

3. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. Observasi yang dilakukan peneliti dengan pengamatan dan pencatatan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan realisasi dana desa tahun 2019.

4. Survei/Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Dalam penelitian ini peneliti membuat kuesioner secara terstruktur untuk memudahkan dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang pada daftar pertanyaan tersebut telah tersedia beberapa alternatif jawaban, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang dianggap sesuai melalui instrument penelitian.

Dalam rancangan survei, peneliti mendeskripsikan (angka-angka) kecenderungan-kecenderungan, perilaku-perilaku, atau opini-opini dari suatu populasi dengan meneliti sampel populasi tersebut. Dengan metode survei tersebut akan menghasilkan gambaran atau suatu populasi dengan mempelajari sampel, untuk dapat digeneralisasikan sebagai sikap keputusan suatu populasi tersebut. Penyebaran survei dengan cara kuesioner ini diserahkan kepada pemerintah desa yang khusus

dalam penyusunan laporan dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Pagentan.

1.8.7 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dengan metode wawancara, *desk study* dan observasi adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2004:280- 281), “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

Analisis data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu analisis data kuantitatif deskriptif melalui pemaparan statistika dan grafik sederhana (Tashakkori dan Teddlie, 2010). Kegiatan analisis data kuantitatif dimulai dari pengolahan data, penyajian data, dan yang terakhir melakukan analisis data. Kegiatan pengolahan data sendiri melalui pengeditan data, coding dan transformasi data, kemudian tabulasi data. Penyajian data bisa dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain sebagainya. Analisis data dilakukan dengan cara analisis statistik deskriptif, melalui analisis potret data. Potret data yaitu menjelaskan besaran frekuensi dari pengolahan data dan angka-angka dalam bentuk presentase. Jadi, dalam analisis statistik deskriptif ini, penulis hanya mencoba untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan hasil temuan sebagai keadaan atau kondisi kapasitas pemerintah desa.

1.8.8 Kualitas Data

Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Menurut Sugiyono (2006:267), Validitas merupakan “derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti”. Menurut Hamidi (2004:82-83), Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

1. Teknik triangulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya

mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.

2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (*member check*).

3. Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat di jurusan tempat penelitian belajar, termasuk koreksi di bawah para pembimbing.

Sugiyono (2006:273-274), menjelaskan ada tiga macam triangulasi. Ketiga triangulasi tersebut yaitu triangulasi sumber, pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda.

3. Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi, siang, maupun malam hari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang diperlukan oleh peneliti.